



Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela pada Perbankan Syariah di Indonesia

Siti Rokhanyah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi empiris terkait pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank syariah. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite tata kelola terintegrasi, komite tata kelola perusahaan, komite manajemen risiko, komite pemantau risiko, serta kepemilikan institusi. Sampel dipilih dengan kriteria; merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2016-2019. Terdapat 13 BUS yang memenuhi kriteria. Data dianalisis menggunakan regresi data panel (fixed effect) dengan toleransi kesalahan 5%. Berdasarkan hasil analisis regresi disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, serta komite tata kelola terintegrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Sementara itu, komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Komite tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusi tidak memiliki efek terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perbankan syariah. Secara teoritis, temuan ini berimplikasi pada penambahan warna dalam literatur tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela di perbankan syariah, yang sejauh ini terfokus dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam tataran praktis, temuan ini berguna bagi eksekutif di perbankan syariah, khususnya dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan pengungkapan sukarela.

Kata Kunci : Pengungkapan Sukarela; Tata Kelola Perusahaan; Perbankan Syariah.

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
e-mail: siti.rokhanayah.02@gmail.com

Abstract

This study investigated empirically the effect of good corporate governance on the level of voluntary disclosure in annual reports of Islamic banks. Corporate governance was proxied by managerial ownership, board of commissioners, audit committee, nomination and remuneration committee, integrated governance committee, corporate governance committee, risk management committee, risk monitoring committee, and institutional ownership. Samples are selected with criteria; a Sharia Commercial Bank (BUS) that was consistent in publishing annual reports in 2016-2019. There are 13 BUS that meet the criteria. Data were analyzed using panel data regression (fixed effect) with an error tolerance of 5%. Based on the results of the regression analysis it was concluded that managerial ownership, the board of commissioners, the audit committee, the nomination and remuneration committee, and the integrated governance committee had a positive effect on the level of voluntary disclosure. Meanwhile, the risk management committee and risk monitoring committee negatively impact to the level of voluntary disclosure. The corporate governance and institutional ownership committee has no effect on the level of voluntary disclosure in annual Islamic banking reports. Theoretically, these findings have implications for adding literature on corporate governance and voluntary disclosure in Islamic banking, which has so far focused on qualitative descriptive methods. On a practical level, these findings are useful for executives in Islamic banking, particularly in implementing good corporate governance and voluntary disclosure policies.

Keywords : Voluntary Disclosure; Corporate Governance; Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sistem teknologi dan informasi, transparansi menjadi suatu hal yang amat penting. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang relevan dan reliabel atas suatu entitas pada periode tertentu, yang disebarkan secara luas sehingga dapat diakses secara umum. Transparansi dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan hingga pada pengungkapan beberapa informasi terkait yang sangat berguna untuk pihak tertentu (*interested user*), khususnya untuk dasar penentuan kebijakan keuangan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan ada yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib menjadi keharusan, di mana perusahaan wajib menyajikan informasi minimal sesuai aturan badan pengawas maupun ketentuan standar akuntansi. Sementara pengungkapan sukarela sering dianggap nilai lebih, karena mengungkapkan informasi melebihi kewajiban minimal (pengungkapan



wajib). Hal ini dimaksudkan untuk keterbukaan akses informasi yang lebih sehingga akan memudahkan pemakai laporan keuangan dalam menghimpun informasi perusahaan untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang enggan untuk memberikan pengungkapan sukarela dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut akan membuka rahasia perusahaan yang semestinya tidak menjadi konsumsi publik. Asas biaya dan manfaat (*cost and benefit*) menjadi alasan yang tidak kalah penting untuk memberikan pengungkapan sukarela.

Di antara faktor yang sangat mungkin menjadi pertimbangan perusahaan/ entitas untuk memberikan pengungkapan sukarela adalah *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan sistem pengendali perusahaan agar tetap pada ketentuan yang seharusnya (Syafitri *et. al.*, 2018). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik salah satu tujuannya yakni untuk meminimalisir ketidakseimbangan informasi pada agen dan prinsipal. Perusahaan yang benar-benar kuat dalam hal tata kelolanya akan mengungkapkan lebih banyak informasi, dalam rangka mewujudkannya transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Hasan *et. al.*, 2017; Magdalena *et. al.*, 2017).

Studi terkait pengungkapan sukarela dan tata kelola perusahaan telah dilakukan beberapa kali pada perusahaan publik, namun dengan hasil yang tidak konsisten. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), diperoleh bukti empiris bahwa pengungkapan sukarela memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan, yang dalam hal ini nilai perusahaan diproksikan dengan nilai kapitalisasi pasar (MCAP) (Melyana & Syafruddin, 2015). Dengan objek yang sama, kajian yang lain memperoleh temuan empiris adanya pengaruh positif antara jumlah dewan komisaris dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela; sebaliknya, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berefek pada tingkat pengungkapan sukarela (Wijayani *et. al.*, 2019).

Kajian empiris lain fokus pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang bertatus aktif di BEI. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh antara kepemilikan publik dan komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Simpulan ini mengindikasikan pentingnya pemenuhan pengungkapan sukarela pada suatu perusahaan.

Simpulan lain dari kajian ini adalah eksistensi komite audit memiliki peran dalam hal kontrol kepatuhan pelaporan keuangan, yang salah satu di antaranya adalah pengungkapan sukarela. Sebaliknya, dewan komisaris maupun komisaris independen tidak berdampak pada tingkat pengungkapan sukarela, dengan argumen bahwa dewan komisaris dan komisaris independen lebih menekankan pengawasan pada *mandatory disclosure* atau pengungkapan yang sifatnya wajib (Fatmawati *et. al.*, 2018).

Temuan penelitian lainnya, yang dilakukan pada laporan keuangan 100 perusahaan publik di Bombay Stock Exchange, menyatakan adanya variasi dampak tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Tiga atribut tata kelola perusahaan (*board independence*, *board gender diversity*, dan *risk management committee*) secara statistik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sementara atribut tata kelola perusahaan lainnya (*board size*, *role duality*, *ownership concentration*, *audit committee*, *risk management committee* dan *remuneration committee*) secara empiris tidak berdampak pada pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019).

Penelitian ini akan menginvestigasi secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa kajian terhadap *corporate governance* maupun pengungkapan sukarela di perbankan (syariah) didominasi dengan metode kualitatif deskriptif. Sementara penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang fokus pada analisis regresi data panel, guna menguji keabsahan atas dugaan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela di perbankan syariah Indonesia.

Hasil kajian ini diharapkan dapat berimplikasi pada penambahan literatur di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam kajian tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela. Terlebih, penelitian ini menggunakan 9 atribut tata kelola perusahaan, yang mana beberapa atribut belum ditemukan kajian empiris terkait, hingga sejauh ini. Adapun dari aspek praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak eksekutif di perbankan syariah dan para pemangku kepentingan, dalam hal penentuan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela di perbankan syariah.



KAJIAN LITERATUR

Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela merupakan suatu pengungkapan tambahan yang tidak diwajibkan oleh peraturan. Perusahaan boleh memberikan informasi tambahan dan tidak ada konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memberikan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu indikator adanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Wijayani *et. al.*, 2019).

Manajemen berhak untuk menentukan pilihan dalam hal publikasi informasi akuntansi maupun informasi terkait manajemen yang relevan serta berguna untuk dasar pengambilan keputusan bisnis bagi pengguna laporan keuangan. Informasi-informasi penting tersebut dituangkan sebagai bentuk pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela di sini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, dalam rangka peningkatan manfaat laporan keuangan (Andriyanto & Metalia, 2015; Wijayani *et. al.*, 2019). Selain itu, pengungkapan sukarela berfungsi untuk meminimalisir adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetrical information*) antara pemegang saham dan pihak manajemen.

Dalam kajian ini, pengungkapan sukarela diproksikan dengan Indeks Identitas Etika (*Ethical Identity Index/EII*) bank syariah yang dikembangkan oleh (Haniffa & Hudaib, 2007). Pemilihan proksi ini mengacu pada alasan bahwa idealnya bank syariah memiliki identitas etis, dalam mengkomunikasikan laporan keuangannya. EII terdiri dari 5 prinsip utama, yang dikembangkan dalam 8 dimensi, dan dijabarkan dalam 78 item (Haniffa & Hudaib, 2007).

Tabel 1
Penjabaran 5 Prinsip EII menjadi 8 Dimensi Indeks Identitas Etika

DIMENSI INDEKS IDENTITAS ETIKA (D)	PRINSIP INDEKS IDENTITAS ETIKA (P)				
	Filosofi dan nilai yang mendasari bank syariah (P1)	Penyediaan produk dan jasa tanpa bunga (P2)	Pembatasan bank syariah pada transaksi yang diperbolehkan syariat (P3)	Fokus kepada tujuan pengembangan dan sosial (P4)	Tunduk kepada tinjauan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (P5)
Pernyataan visi dan misi (D1)	√				
Dewan komisaris dan manajemen atas/ puncak (D2)	√				
Produk (D3)		√	√		
Zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan (D4)				√	
Karyawan (D5)				√	
Debitur (D6)				√	
Masyarakat (D7)				√	
Dewan Pengawas Syariah (DPS) (D8)					√

Sumber: (Haniffa & Hudaib, 2007)

Sebagaimana dalam tabel 1, terlihat bahwa dimensi pernyataan visi dan misi (D1) dan informasi seputar dewan komisaris dan manajemen atas (D2) diturunkan dari prinsip filosofis dan nilai-nilai yang melandasi bank syariah (P1). Dimensi produk (D3) berasal dari penjabaran prinsip penyediaan produk dan jasa yang bebas bunga (P2) dan pembatasan aktivitas bank syariah pada transaksi-transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (P3).



Selanjutnya, dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan (*qord*) (D4), dimensi tenaga kerja/ karyawan (D5), dimensi debitur (D6), dan dimensi masyarakat (D7) dikembangkan dari prinsip yang sama, yaitu prinsip fokus kepada tujuan pengembangan dan aktivitas sosial (P4). Terakhir, ada dimensi Dewan Pengawas Syariah (D8) mengacu pada prinsip tunduk kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) (P5) (Haniffa & Hudaib, 2007). Selanjutnya, 8 dimensi tersebut dikembangkan menjadi 78 item pengukuran.

Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela

1. Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan sukarela

Dalam kepemilikan manajerial, manajer mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pemegang saham dan sebagai agen yang senantiasa menjalankan aktivitas operasional perusahaan (bank syariah). Kondisi semacam ini terkadang dinilai sebagai suatu mekanisme agar manajer dapat berkerja lebih maksimal untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. Hal ini dikarenakan baik dan buruknya kinerja perusahaan akan berdampak pada pribadi pihak manajemen sebagai pemegang saham. Di sisi lain, pengungkapan sukarela berpotensi menjadi nilai plus bagi perusahaan. Pengungkapan sukarela akan memberikan informasi yang lebih, sehingga para pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang lebih banyak untuk dasar pengambilan keputusan. Sebagai salah satu unsur dalam *corporate governance*, kepemilikan manajerial diprediksi berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela. Dengan kata lain, semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka jumlah pengungkapan sukarela akan semakin meningkat.

Kajian empiris sebelumnya memperoleh temuan bahwa jumlah kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap jumlah pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019). Temuan ini disertai dengan argumen bahwa pada beberapa perusahaan (publik), di mana jumlah kepemilikan manajerial relatif kecil, maka para manajer tidak memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan perusahaan secara penuh menjadi kewenangan pemegang saham mayoritas (Saha & Kabra, 2019; Wijayani *et. al.*, 2019).

Hasil penelitian empiris lainnya, yang dilakukan pada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, menyatakan bahwa

jumlah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela (Fatmawati et.al., 2018). Hasil penelitian ini diikuti dengan alasan logis, di mana jumlah kepemilikan saham publik akan memicu perusahaan untuk mengungkapkan informasi selengkap mungkin pada laporan tahunan. Pemegang saham (kepemilikan publik) sudah pasti menghendaki informasi seluas mungkin terhadap perusahaan yang menjadi tempat investasi. Publikasi informasi perusahaan juga akan berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham untuk memantau kondisi perusahaan, mengingat mereka hanya bisa mengawasi tanpa terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan operasional di perusahaan (Fatmawati et. al., 2018).

Di sisi lain, studi yang sama juga dilakukan dengan sampel perusahaan umum di Bursa Efek Cina. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor kepemilikan manajerial berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela. Jadi, semakin besar jumlah kepemilikan manajerial, maka jumlah pengungkapan sukarela semakin banyak (Li & Qi, 2018). Sama halnya dengan hasil kajian empiris pada 55 perusahaan publik di Amman Stock Exchange (AMA). Diperoleh temuan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela (Al-Nimer, 2019).

Temuan dari beberapa studi sebelumnya tidak konsisten dalam menyatakan dampak kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini cenderung berlogika bahwa kepemilikan manajerial yang banyak akan berpotensi meningkatkan pengungkapan sukarela, sehingga dirumuskan hipotesis 1;

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sukarela

2. Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sukarela

Variable dewan komisaris diprosikan dengan jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan (bank syariah) (Saha & Kabra, 2019; Wijayani et.al., 2019). Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kerja Direksi, termasuk memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan Direksi dalam suatu perusahaan. Temuan empiris terkait efek dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela tidak konsisten. Beberapa penelitian sebelumnya



menyajikan temuan empiris yang menunjukkan adanya dampak positif dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela (Al-Nimer, 2019; Saha & Kabra, 2019; Wijayani et.al., 2019). Selain itu, juga diperoleh hasil empiris dari penelitian lain, yang membuktikan tidak adanya pengaruh antara dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela (Fatmawati et.al., 2018).

H₂: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

3. Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Variable komite audit direpresentasikan dengan jumlah semua anggota komite audit di suatu perusahaan (bank syariah) (Fatmawati et.al., 2018; Saha & Kabra, 2019). Setiap perusahaan wajib memiliki komite audit dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Studi empiris terkait pengaruh komite audit terhadap pengungkapan sukarela sudah dilakukan beberapa kali, dengan hasil yang tidak konsisten. Komite audit berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela (Al-Nimer, 2019; Fatmawati et. al., 2018). Meskipun demikian, ada penelitian yang menghasilkan temuan berlawanan, yaitu komite audit tidak memiliki dampak terhadap pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019; Wijayani et. al., 2019).

Dalam kajian empiris ini, komite audit diprediksi akan berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela. Prediksi ini mengacu pada argumen bahwa komite audit akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga, kondisi tersebut mendukung perusahaan untuk mempublikasikan informasi yang lebih banyak pada publik. Jadi, hipotesis ke-tiga dalam penelitian ini adalah;

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

4. Komite Remunerasi dan Nonimasi Terhadap Pengungkapan Sukarela

Komite remunerasi dan nonimasi menjadi bagian dari manajemen di perusahaan perbankan (termasuk perbankan syariah). Kajian empiris sebelumnya menyatakan bahwa komite nonimasi dan remunerasi tidak memiliki efek terhadap pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019). Komite nominasi dan remunerasi memegang peran penting dalam hal pengembangan kualitas dan kinerja manajemen tertinggi (*top manager*) yang

dituangkan melalui kebijakan remunerasi dan nominasi yang senantiasa memprioritaskan faktor ketahanan perusahaan dan faktor kelangsungan usaha. Komite ini juga bertugas untuk memantau, menilai, melakukan evaluasi, dan menjamin konsistensi atas implementasi sistem nominasi dan remunerasi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2018)

Adanya komite remunerasi dan nominasi akan berpotensi meningkatkan kinerja pihak manajemen puncak. Hal ini akan mendukung kinerja perusahaan secara umum. Sehingga, peningkatan kinerja ini tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela suatu perusahaan, termasuk di perbankan syariah.

H₄: Komite remunerasi dan nonimasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

5. Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pengungkapan Sukarela

Komite tata kelola terintegrasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerjanya kepada Dewan Komisaris di suatu perusahaan (bank syariah). Komite ini berperan dalam mengawasi implementasi tata kelola terintegrasi yang mengacu pada berbagai ketentuan dan kebijakan sesuai dengan undang-undang dan aturan syariat. Fungsi pengawasan ini sebenarnya menjadi tugas utama Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya dibantu komite tata kelola terintegrasi (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2018)

Belum ditemukan kajian empiris terkait komite tata kelola terintegrasi dan pengungkapan sukarela. Pada prinsipnya, eksistensi komite ini sama dengan komite yang lainnya, yang tujuannya untuk upaya peningkatan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kinerja suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan untuk memberikan pengungkapan sukarela.

H₅: Komite tata kelola terintegrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.



6. Komite Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela

Komite tata kelola perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk bersama-sama dengan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan penjaminan atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* pada semua aspek dan semua level organisasi di lingkungan perusahaan (bank syariah) (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2018). Keberadaan komite ini akan menunjang pencapaian kinerja perusahaan, sehingga sangat dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan pengungkapan sukarela.

H₆: Komite tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

7. Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Sukarela

Sebagaimana komite-komite yang lain, komite manajemen risiko dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas pokok dewan komisaris, khususnya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2018). Adanya komite ini akan mendukung pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019). Hal ini disebabkan adanya komite manajemen risiko akan berefek pada kinerja perusahaan, yang sangat berpotensi untuk memberikan pengungkapan sukarela.

H₇: Komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

8. Komite Pemantau Risiko dan Pengungkapan Sukarela

Komite pemantau risiko memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan dan memberi arahan pada Direksi terkait manajemen risiko bank. Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok Dewan Komisaris, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi berbagai kebijakan terkait manajemen risiko bank syariah (PT. Bank Syariah Mandiri, 2019). Terpenuhinya tanggung jawab komite pemantau risiko akan mendukung peningkatan kinerja bank, yang berpeluang untuk meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela.

H₈: Komite pemantau risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

9. Kepemilikan Institusi dan Pengungkapan sukarela

Kepemilikan institusi (*institutional ownership*) didefinisikan sebagai rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap seluruh jumlah saham suatu perusahaan (Rokhanyah, 2020b). Kepemilikan institusi sering dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kemampuan mengendalikan pihak manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusi dapat membuka peluang untuk mempengaruhi pihak manajemen dalam memberikan pengungkapan sukarela.

Kajian empiris terkait dua variabel ini pernah dilakukan sebelumnya dengan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kesimpulan akhirnya bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela (Wijayani *et. al.*, 2019). Artinya, semakin besar presentase kepemilikan institusi, maka semakin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan ke publik.

H₃: Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia tahun 2016-2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan menerapkan beberapa kriteria (*purposive sampling*), yaitu;

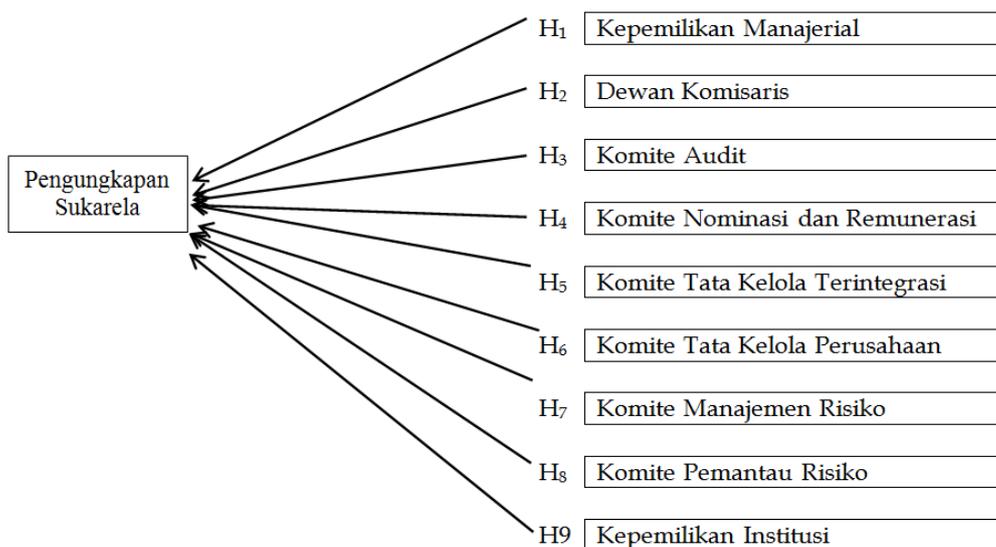
1. Merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Sampel penelitian ini tidak melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini dikarenakan adanya kesatuan manajemen UUS dengan bank konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan bias pada data yang akan dianalisis.
2. Konsisten menerbitkan laporan tahunan dalam rentang waktu 2016-2019 dan atau menampilkan informasi seputar manajemen bank syariah di laman resmi bank syariah.



Model Analisis

Penelitian ini akan menguji secara empiris tentang efek dari tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela, sebagaimana tergambar dalam bagan 1. Dalam hal ini, variabel tata kelola perusahaan diproksikan dengan beberapa atribut, yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite tata kelola terintegrasi, komite tata kelola perusahaan, komite manajemen risiko, komite pemantau risiko, dan kepemilikan manajerial. Sementara itu, variabel pengungkapan sukarela dicerminkan oleh Indeks Identitas Etika (*Ethical Identity Index/EII*), yang instrumen pengukurannya diinisiasi oleh (Haniffa & Hudaib, 2007).

Bagan 1.
Kerangka Penelitian



Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi data panel, dengan data yang bersumber dari laporan tahunan dan atau laman resmi Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Berikut persamaan regresi

$$VD_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 DK_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 KNR_{it} + \beta_5 KTKT_{it} + \beta_6 KTKP_{it} + \beta_7 KMR_{it} + \beta_8 KPR_{it} + \beta_9 KI_{it} + \epsilon_{it}$$

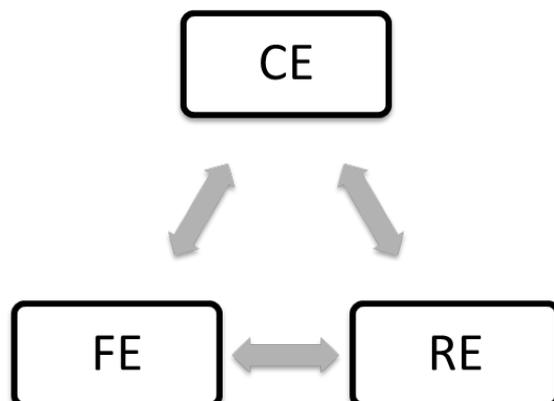
Di mana;

VD_{it}	: Tingkat pengungkapan sukarela di BUS i pada periode t
KM_{it}	: Presentase kepemilikan manajerial di BUS i pada periode t
DK_{it}	: Dewan komisaris pada BUS i pada periode t
KA_{it}	: Komite audit di BUS i pada periode t
KNR_{it}	: Komite nominasi dan remunerasi di BUS i pada periode t
$KTKT_{it}$: Komite tata kelola terintegrasi di BUS i pada periode t
$KTKP_{it}$: Komite tata kelola perusahaan di BUS i pada periode t
KMR_{it}	: Komite manajemen risiko di BUS i pada periode t
KPR_{it}	: Komite pemantau risiko di BUS i pada periode t
KI_{it}	: Presentase kepemilikan institusi di BUS i pada periode t
ε_{it}	: Residual
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien regresi.

Model regresi tersebut di atas tidak dapat langsung diujikan untuk membuktikan hipotesis. Hal ini dikarenakan ada tiga tipe model regresi panel yang berbeda, yang masing-masing menyesuaikan dengan data yang akan diujikan. Ketiga tipe model regresi tersebut adalah *Common Effect (CE)*, *Fixed Effect (FE)*, serta *Random Effect (RE)*. Dari ketiga model tersebut, hanya ada satu model terbaik dan paling tepat untuk suatu data tertentu. Maka dari itu diperlukan uji pendahuluan (yang terdiri atas uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier) dalam rangka menentukan model regresi terbaik yang harus dipilih (Winarno, 2015; Ghozali, 2018). Ketiga jenis uji pendahuluan tersebut tidak harus dilakukan semua, tetapi melihat hasil pada setiap uji yang telah dilakukan, sebagaimana siklus yang ada di gambar 2.



Gambar 1
Siklus Uji Pendahuluan dalam Analisis Regresi Data Panel



Sumber: Winarno, 2015; Ghozali, 2018

Keterangan gambar 2:

1. Uji chow diperlukan dalam rangka menentukan model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada tahap ini diperoleh kesimpulan model terpilih adalah *fixed effect* (H_1 terdukung karena $(p\text{-value} \leq 0,05)$), maka lanjut ke tahap 2 (uji hausman). Tetapi, jika model terpilihnya adalah *common effect* (H_0) karena $(p\text{-value} > 0,05)$, maka proses selanjutnya melompat ke tahap 3 (uji lagrange multiplier), untuk memilih model terbaik antara *common effect* atau *random effect*.
2. Uji hausman yang hasilnya akan menunjukkan model paling tepat antara *fixed effect* dan *random effect*. Jika hasil uji hausman menerima H_1 ($p\text{-value} \leq 0,05$), maka model terpilih untuk analisis regresi adalah *fixed effect*. Sebaliknya, andaikan model terpilihnya *random effect*, maka perlu dilanjut hingga tahap 3, uji lagrange multiplier.
3. Uji lagrange multiplier yang berguna dalam mempertimbangkan pilihan model yang cocok dengan karakter data, antara *random effect* dan *common effect*. Jika H_1 terdukung ($p\text{-value} \leq 0,05$), maka model terpilihnya adalah *random effect*, sedangkan jika yang terdukung H_0 ($p\text{-value} > 0,05$), maka model terpilihnya yaitu *common effect*.

Seluruh rangkaian pengujian pendahuluan dan analisis regresi dilakukan dengan *Software Eviews 10*, agar akurasi hasil analisis lebih terjamin.

Variabel dan Pengukurannya

1. Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela diproksikan dengan Indeks Identitas Etika/ EII bank syariah yang mampu menunjukkan implementasi identitas etis suatu bank syariah dalam proses pelaporan keuangan. Instrumen pengukuran ini mengadopsi (Haniffa & Hudaib, 2007), yang mana EII berawal dari 5 prinsip pokok, yang selanjutnya dikembangkan menjadi 8 dimensi, dan berlanjut hingga turun ke bagian yang lebih rinci menjadi 78 item pengukuran. Formula untuk menghitung EII per dimensi adalah sebagai berikut;

$$EII_j = \sum_{i=1}^{nj} X_{ij}$$

Di mana;

EII : Indeks Identitas Etika (*Ethical Identity Index*)

j : Dimensi Indeks Identitas Etika

N_j : Jumlah item (konstruk) yang diungkapkan oleh bank syariah untuk masing-masing dimensi j

X_{ij} : Bernilai 1 jika diungkapkan dan bernilai 0 jika tidak diungkapkan. Nilai X_{ij} akan berkisar di antara 0 dan 1 ($0 \leq X_{ij} \leq 1$)

Berikut rumus untuk menghitung EII secara menyeluruh;

$$EII = \frac{\sum_{i=1}^{nj} X_{ij}}{nj}$$

Nilai EII mencerminkan idealisme identitas etika. Tingginya EII menjadi bukti rendahnya *gap* antara identitas etika yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah terhadap kondisi ideal yang seharusnya (Haniffa & Hudaib, 2007).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan presentase hak suara yang dimiliki pihak manajemen suatu perusahaan (Wijayani *et. al.*, 2019). Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah presentase kepemilikan manajerial di bank syariah.



3. Komite Audit
Komite audit dinilai dari jumlah anggota komite audit pada bank syariah (Fatmawati *et. al.*, 2018).
4. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite remunerasi dan nominasi dalam penelitian ini adalah anggota komite remunerasi dan nominasi secara menyeluruh yang ada di suatu bank syariah (Saha & Kabra, 2019).
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Variabel ini diukur dengan jumlah anggota komite tata kelola terintegrasi di suatu bank syariah.
6. Komite Tata Kelola Perusahaan
Penilaian variabel ini dilihat dari jumlah anggota yang tergabung dalam komite tata kelola perusahaan di bank syariah.
7. Komite Manajemen Risiko
Komite manajemen risiko dilihat dari jumlah anggota komite manajemen risiko di bank syariah tertentu (Saha & Kabra, 2019).
8. Komite Pemantau Risiko
Komite pemantau risiko dinilai berdasarkan jumlah anggota komite manajemen risiko di bank syariah tertentu.
9. Kepemilikan Institusi
Kepemilikan institusi diformulasikan dengan (Hitten, 2016; Rokhaniyah, 2020b);

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah keseluruhan saham}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Data

Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah di Indonesia pada periode 2016 hingga 2019, yang dipilih berdasarkan kriteria;



Tabel 2
Proses Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah			
	2016	2017	2018	2019
Merupakan Bank Umum Syariah (BUS)*	13	13	14	14
Menerbitkan laporan tahunan dan atau informasi terkait manajemen bank syariah pada laman resmi bank syariah**	13	13	14	14
Jumlah sampel akhir***	13	13	13	13

*Posisi di akhir tahun (Statistik Perbankan Syariah Desember)

**Hasil identifikasi pada masing-masing laman resmi bank

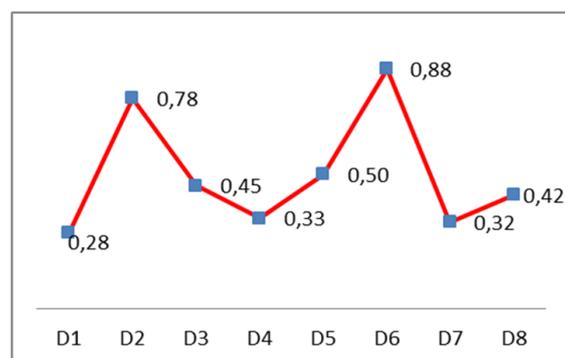
***Menyesuaikan jumlah sampel pada tahun 2016 dan 2017

Tabel 2 menampilkan proses penentuan sampel penelitian sesuai dengan dua kriteria yang telah ditentukan. Karena tipe data yang digunakan adalah *balance sample* (data penel), maka data yang dipilih harus memiliki unsur konsistensi pada setiap periode, sehingga sampel yang terpilih berjumlah 13 bank. Tiga belas bank yang terpilih menjadi sampel tersebut adalah;

- Bank Muamalat
- Bank Victoria Syariah
- BRI Syariah
- BJB Syariah
- BNI Syariah
- Bank Syariah Mandiri
- Panin Dubai Syariah
- Bank Syariah Bukopin
- BCA Syariah
- BTPN Syariah
- Maybank syariah
- Bank Aceh Syariah
- Bank Mega Syariah

Pengungkapan Sukarela

Gambar 2
Delapan Dimensi EII pada Bank Syariah Tahun 2016-2019



Sumber: Hasil olah data, 2020



Pengungkapan sukarela diukur dengan 8 dimensi EII yang telah diformulasikan oleh (Haniffa & Hudaib, 2007). Dari 13 sampel bank syariah, rata-rata skor per dimensi EII selama 2016-2019 tercermin dalam gambar 2. Dimensi debitur (D6) memiliki skor tertinggi, yaitu 0,88. Artinya bahwa animo pelaporan sukarela terkait aspek debitur cukup tinggi. Dimensi ini dituangkan dalam 4 item pengukuran, yakni kebijakan utang, nilai utang yang dihapus, tipe aktivitas peminjaman umum, dan tipe aktivitas peminjaman khusus (Haniffa & Hudaib, 2007).

Skor tertinggi kedua adalah dewan komisaris dan manajemen puncak (D2), dengan rerata sebesar 0,78. Dimensi ini meliputi 13 item, yaitu nama, jabatan, foto, profil, kepemilikan saham, jabatan ganda, serta komposisi dewan komisaris (eksekutif dan non eksekutif). Item pengukuran lainnya adalah terkait keanggotaan komite audit dan peran ganda (*role duality*) di mana CEO merupakan ketua dewan komisaris. Segala hal yang berkaitan dengan manajemen puncak juga menjadi item pengukuran dalam dimensi ini, yaitu nama, posisi, foto, serta profil manajemen puncak (Haniffa & Hudaib, 2007). Tingginya nilai pada dimensi ini menjadi bukti bahwa informasi seputar dewan komisaris dan manajemen puncak telah banyak diungkapkan oleh bank syariah.

Dimensi karyawan (D5) menempati urutan ketiga, dengan nilai 0,50. Terdapat 9 item pengukuran pada dimensi ini, yaitu adanya apresiasi karyawan, penghargaan kepada karyawan, jumlah karyawan, kebijakan persamaan kesempatan (*equal opportunity*), dan kesejahteraan karyawan. Aspek pelatihan (*training*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari unsur ini, yang terdiri atas pelatihan kesyariahan (*shari'a awareness*), pelatihan lain, pelatihan skema perekrutan, serta pelatihan moneter (Haniffa & Hudaib, 2007). Skor pengungkapan pada dimensi ini hanya mencapai 50%, yang artinya pengungkapan terkait karyawan pada bank syariah berada pada posisi moderat.

Skor dimensi produk dan layanan (D3) berada pada posisi keempat, dengan rerata nilai 0,45. Dimensi ini dituangkan dalam 10 item pengukuran, yang meliputi; tidak ada keterlibatan dalam aktivitas non-halal (*non-permissible activities*), persentase keuntungan dari keterlibatan pada aktivitas non halal, argumen atas keterlibatan pada aktivitas non-halal, serta penanganan aktivitas non-halal. Selain itu, dimensi ini juga melibatkan aspek terkait produk dan layanan bank syariah, yaitu mengenalkan produk baru, ada persetujuan DPS

sebelum meluncurkan produk baru, adanya landasan syariah atas produk baru, dan memberikan definisi atas produk baru. Aktivitas investasi umum dan khusus juga menjadi komponen dalam pengukuran EII pada dimensi produk dan layanan (Haniffa & Hudaib, 2007). Rerata nilai pada dimensi ini relatif rendah, di bawah 50%. Hal ini menunjukkan terbatasnya informasi terkait produk dan layanan bank syariah yang telah diungkapkan.

Urutan berikutnya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (D8), dengan rerata skor sebesar 0,42. Item pengukuran pada dimensi ini mencakup segala hal tentang DPS, termasuk peran DPS di perbankan syariah. Kriteria pengungkapannya terdiri atas; nama dan foto DPS, remunerasi bagi DPS, laporan yang telah ditandatangani oleh semua DPS, jumlah rapat yang telah diselenggarakan, pemeriksaan seluruh transaksi bisnis sebelum dan sesudah (*ex ante* dan *ex post*), pengujian sampel transaksi bisnis sebelum dan sesudah, laporan terkait produk cacat (*defects in product*) yang menyangkut spesifikasi dan perinciannya, rekomendasi atas produk cacat, kebijakan manajemen atas produk cacat, serta distribusi untung rugi sesuai ketentuan syariat (Haniffa & Hudaib, 2007). Item-item pengungkapan tersebut belum sepenuhnya diungkapkan, bahkan masih di bawah 50%.

Selanjutnya, dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan (D4), dengan rerata nilai 0,33. Dimensi ini terdiri atas 15 item pengukuran, yaitu bank syariah bertanggung jawab atas zakat, nilai yang dibayarkan untuk zakat, sumber dana zakat, penyaluran dana zakat, saldo dana zakat yang belum didistribusikan, alasan adanya saldo dana zakat, pengesahan oleh DPS atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, pengesahan DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai ketentuan syariah, jumlah zakat yang harus dibayarkan individu, sumber dan penggunaan dana sedekah, sumber dan penggunaan dana pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*), kebijakan terkait penyediaan dana pinjaman kebajikan dan kebijakan terkait dana pinjaman kebajikan yang tidak kembali (*non-payment*) (Haniffa & Hudaib, 2007). Pencapaian skor rerata pada dimensi ini mengisyaratkan kurangnya pengungkapan informasi tentang zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan oleh bank syariah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pengungkapan pada dimensi ini.



Dimensi selanjutnya adalah dimensi masyarakat (D7) yang menggambarkan upaya entitas perbankan untuk terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Dimensi ini dijabarkan dalam 7 item pengukuran; cabang untuk kaum wanita (*women branch*), penciptaan lapangan kerja, adanya dukungan pada organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, keterlibatan dalam aktivitas sosial pemerintah, menjadi sponsor untuk kegiatan masyarakat, komitmen terhadap peran sosial, dan konferensi ekonomi Islam (Haniffa & Hudaib, 2007). Skor pengungkapan pada dimensi ini hanya mencapai 0,32, sehingga diperlukan mekanisme untuk meningkatkan skor tersebut, baik secara praktis maupun pelaporannya.

Dimensi pernyataan visi dan misi (D1) dalam 4 tahun terakhir menduduki urutan terakhir, dengan rerata skor pengungkapan 0,28. Dimensi ini dipecah menjadi 9 item pengungkapan; komitmen untuk senantiasa beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, komitmen untuk menyediakan keuntungan (*return*) sesuai prinsip-prinsip syariah, fokus untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham, memberikan pelayanan kepada komunitas muslim saat ini (*current directions*) dan masa mendatang (*future directions*), komitmen untuk hanya terlibat pada aktivitas investasi dan pendanaan yang diperbolehkan, komitmen untuk memenuhi kontrak (*uqud*), serta ada apresiasi terhadap pemegang saham (*shareholders*) dan nasabah (*customers*) (Haniffa & Hudaib, 2007).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan kondisi data secara menyeluruh dengan beberapa indikator. Di antara indikator statistik deskriptif yang digunakan adalah *mean*, *median*, nilai minimum, nilai maksimum, dan deviasi standar.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Keterangan	VD	KM	DK	KA	KNR	KTKT	KTKP	KMR	KPR	KI	Residual
Mean	0,48	0,02	3,85	3,85	3,69	2,23	2,08	5,77	3,54	94,8	-3,60
Median	0,44	0	3	3	4	2	2	4	3	100	0,05
Maksimum	0,7	0,02	7	8	5	3	3	18	6	100	0,12
Minimum	0,3	0	2	3	2	2	2	2	2	60,3	-0,17
Dev. standar	0,13	0,05	1,36	1,42	1,07	0,43	0,27	4,75	1,23	10,7	0,06
Jarque-Bera	4,93	228	9,28	52,1	4,37	14,5	228	21	2,88	128	3,84
Probabilitas	0,08	0,00	0,01	4,75	0,11	0,00	1,91	2,77	0,24	1,01	0,15
Jumlah obs.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10



Sebagaimana pada tabel 3, masing-masing indikator statistik deskriptif memiliki hubungan satu sama lain. Nilai tengah (*median*) yang cenderung sama dengan nilai rata-rata (*mean*) mengindikasikan data berdistribusi normal. Probabilitas dari Jarque-Bera akan menunjukkan tipe distribusi data. Misalnya, VD memiliki nilai tengah 0,44 dan nilai rata-rata 0,48. Nilai tengah dan nilai rata-rata yang sama atau hampir sama mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini bisa dibuktikan dengan dengan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,08 (lebih besar dari 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa (*residual*) data memiliki distribusi normal. Tidak semua variabel memiliki distribusi (*residual*) data yang normal (secara individual). Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengganggu keabsahan hasil analisis regresi, karena analisis regresi data panel terbebas dari pemenuhan asumsi pembatas, seperti uji asumsi klasik termasuk uji normalitas (Verbeek, 2012). Meskipun demikian, secara umum (*common sample*) residual data berdistribusi normal (probabilitas Jarque-Bera 0,15).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel tidak terikat dengan asumsi restriksi (Verbeek, 2012). Meskipun demikian, uji pendahuluan diperlukan dalam rangka menentukan model regresi terbaik sesuai dengan tipe data yang ada.

Uji chow wajib dilakukan untuk memilih model yang tepat di antara *common effect* dan *fixed effect*. Berdasarkan output uji chow, nilai probabilitas *period chi-square* sebesar 0,01 ($\leq 0,05$), sehingga menolak H_0 atau *fixed effect* yang terpilih menjadi model terbaik.

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistik	df	Prob.
Period F	3.09	(3,39)	0.04
Period Chi-square	11.10	3	0.01

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10



Hasil Investigasi Empiris

Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini dibuktikan dengan analisis regresi data panel model *fixed effect*. Adapun toleransi kesalahan yang digunakan adalah 5% (level keyakinan 95%). Secara umum, uji ketepatan model atau *goodness of fit* dapat dilihat dari nilai R^2 dan F-statistik. Pada tabel 5, terlihat nilai R^2 sebesar 79% dan F-statistik 12,24 (prob. 0,00). Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong baik (*fit*), sehingga hasil analisis memiliki makna (tabel 5).

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Probabilitas
Konstanta	0,60	0.01
Kepemilikan Manajerial (KM)	0,24	0.00
Dewan Komisaris (DK)	0,05	0.00
Komite Audit (KA)	0,03	0.03
Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)	0,20	0.00
Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	0,25	0.00
Komite Tata Kelola Perusahaan (KTKP)	-0,10	0.30
Komite Manajemen Risiko (KMR)	-0,02	0.00
Komite Pemantau Risiko (KPR)	-0,13	0.00
Kepemilikan Institusi (KI)	0,01	0.45
R^2	0,79 (79%)	
Adjusted R^2	0,73 (73%)	
F-Statistik	12,24	0,00

Sumber: Hasil analisis regresi data panel dengan Eviews 10

Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan sukarela

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,00). Artinya bahwa semakin besar presentase kepemilikan manajerial dalam suatu bank syariah, maka tingkat pengungkapan sukarela (Indeks Identitas Etika - EII) akan meningkat. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,24 yang berarti bahwa adanya peningkatan kepemilikan manajerial sebesar 1%, akan diikuti dengan peningkatan EII sebesar 0,24. Dengan demikian, H_1 terdukung secara empiris.

Kepemilikan manajerial identik dengan peran ganda pihak manajemen yang merangkap sebagai pemegang saham suatu perusahaan. Salah satu sisi positif dari kepemilikan manajerial dalam optimalisasi peran dan tanggung jawab pihak manajemen dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial berdampak positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pihak pemangku kepentingan. Banyaknya item yang diungkapkan perusahaan, akan sangat berguna bagi pemangku kepentingan untuk dasar pengambilan keputusan bisnis.

Temuan penelitian ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya (Al-Nimer, 2019; Fatmawati *et. al.*, 2018; Li & Qi, 2018). Meskipun demikian, temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Saha & Kabra, 2019; Wijayani *et. al.*, 2019), yang menyimpulkan tidak ada pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.

Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sukarela

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 2 (H_2) bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka tingkat pengungkapan sukarela akan semakin besar (prob. 0,00). Koefisien regresi dari variabel dewan komisaris sebesar 0,05. Hal ini berarti, setiap ada penambahan seorang anggota dewan komisaris, akan meningkatkan EII sebesar 0,05.

Di antara tugas pokok dewan komisaris adalah berkontribusi dalam memberikan saran terhadap kebijakan yang diusung oleh direksi. Saran tersebut tentunya yang mendukung perkembangan dan kinerja lembaga. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara tidak langsung. Informasi yang disampaikan kepada publik, yang bersifat mandatori maupun sukarela, akan direspon oleh publik. Respon yang diharapkan adalah respon positif yang akan mendorong perkembangan perusahaan.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya (Al-Nimer, 2019; Saha & Kabra, 2019; Wijayani *et. al.*, 2019) yang menyatakan adanya pengaruh positif jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela. Sementara itu, temuan ini bertentangan dengan temuan penelitian (Fatmawati *et. al.*, 2018) yang menyatakan tidak adanya keterkaitan antara jumlah dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan sukarela.



Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Komite audit berdampak positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,03). Secara empiris, temuan ini mendukung hipotesis 3 (H_3), di mana jumlah komite audit berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan sukarela. Koefisien regresi dari komite audit sebesar 0,03, yang berarti bahwa setiap penambahan satu anggota komite audit, akan meningkatkan EII hingga 0,03.

Salah satu tanggung jawab komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap bank syariah, khususnya pada kegiatan yang berhubungan dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Dengan kata lain, komite audit berperan dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Kinerja komite audit akan terlihat dari kualitas pelaporan keuangan bank. Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat memicu peningkatan pengungkapan sukarela oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang berkualitas dan segala hal yang terkait, jika diungkapkan pada publik, akan berpotensi untuk direspon dengan baik juga. Respon baik inilah yang diharapkan akan menjadi stimulus perkembangan dalam jangka panjang.

Temuan penelitian ini senada dengan temuan sebelumnya (Al-Nimer, 2019; Fatmawati *et. al.*, 2018) yang membuktikan secara empiris adanya efek positif antara jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan (Saha & Kabra, 2019; Wijayani *et. al.*, 2019), yang mana temuan empirisnya menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela.

Komite Remunerasi dan Nonimasi terhadap Pengungkapan Sukarela

Komite remunerasi dan nonimasi, yang diukur dengan jumlah anggotanya, berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,0). Adapun nilai koefisien regresinya adalah 0,20 yang artinya jika anggota komite remunerasi dan nonimasi bertambah satu orang, maka skor EII akan naik hingga 0,20. Bukti empiris ini sesuai dengan hipotesis 4.

Di antara kewajiban dari komite remunerasi dan nonimasi adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan remunerasi dan

nominasi bagi dewan komisaris, direksi, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite remunerasi dan nominasi harus senantiasa mempertimbangkan ketahanan dan kelangsungan usaha hingga jangka panjang, serta harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Eksistensi dan optimalisasi fungsi dari komite ini akan mendorong peningkatan kinerja manajemen, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja yang diraih perlu diungkapkan (mandatori dan sukarela), sehingga dapat memperlebar potensi peningkatan kinerja perusahaan pada jangka menengah dan jangka panjang. Temuan ini tidak sejalan dengan kajian empiris sebelumnya yang menyimpulkan tidak adanya efek dari komite nominasi dan remunerasi terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Saha & Kabra, 2019).

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pengungkapan Sukarela

Komite tata kelola terintegrasi berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela (prob. 0,00). Adapun koefisien regresi dari variabel komite tata kelola terintegrasi adalah 0,25. Jika anggota komite bertambah satu orang, maka EII akan meningkat 0,25. Temuan ini identik dengan hipotesis 5 (H_5).

Sebagai bagian dari entitas perbankan, komite tata kelola terintegrasi memiliki fungsi pokok untuk melakukan pengendalian (*monitoring*) dan evaluasi terhadap implementasi tata kelola terintegrasi, terutama dalam hal kecukupan atas penilaian pengendalian internal dan implementasi fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Hasil kerja komite ini dapat dirasakan oleh seluruh komponen di internal bank, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja bank. Kinerja yang baik akan membuka potensi untuk lebih banyak memberikan informasi di luar yang diwajibkan (sukarela).

Komite Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela

Sebagai salah satu komite di bawah dewan komisaris, komite tata kelola perusahaan ikut serta mengemban tugas dewan komisaris, khususnya terkait dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh lini operasional di perbankan syariah. Komite ini dibentuk sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.



Hasil analisis regresi membuktikan bahwa komite tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perbankan syariah (prob. 0,30). Berapapun jumlah anggota komite tata kelola perusahaan tidak akan berdampak pada tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini sangat mungkin terjadi, jika ada komitmen dan loyalitas yang tinggi pada anggota komite untuk menjalankan tugas dan fungsi yang semestinya. Perbedaan jumlah anggota komite tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil pengujian empiris ini berlawanan dengan hipotesis 6 (H_6).

Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Sukarela

Komite manajemen risiko memiliki tanggung jawab utama dalam hal pengkajian atas exposure risiko bank syariah secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah menjamin bahwa exposure risiko dikelola dengan benar. Selain itu, komite ini berperan dalam penanaman manajemen risiko pada seluruh level organisasi di bank syariah. Seluruh tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab jajaran direksi.

Temuan empiris dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite manajemen risiko berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,0), dengan koefisien regresi sebesar -0,02. Artinya, ketika anggota komite manajemen risiko bertambah satu orang, maka EII akan menurun sebesar 0,02. Temuan ini selaras dengan hipotesis 7. Hasil kajian empiris ini didukung dengan argumen bahwa sesuai dengan tugas pokok komite manajemen risiko, mungkin tim komite manajemen risiko sangat konservatif dalam hal pengungkapan segala informasi dalam perusahaan. Jadi, untuk tujuan kehati-hatian, komite ini sangat mungkin untuk memberikan rekomendasi agar membatasi informasi yang dipublikasikan.

Temuan ini bertentangan dengan temuan sebelumnya (Saha & Kabra, 2019) yang dapat memberikan bukti empiris bahwa eksistensi komite manajemen risiko akan mendukung peningkatan pengungkapan sukarela. Pernyataan ini disertai argumen bahwa manajemen risiko yang terimplementasikan dengan baik, sudah selayaknya untuk dipublikasikan agar direspon positif oleh para pemangku kepentingan.



Komite Pemantau Risiko dan Pengungkapan Sukarela

Selain komite manajemen risiko, pada bank syariah dibentuk juga komite pemantau risiko. Dua komite ini memiliki ranah kerja yang relatif sama. Tugas utama komite pemantau risiko adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta implementasinya dalam kegiatan operasional bank syariah.

Analisis regresi memberikan bukti empiris bahwa komite pemantau risiko berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,00), dengan koefisien regresi -0,13. Hal ini berarti bahwa jika ada penambahan satu orang anggota komite pemantau risiko, maka EII akan berkurang sebesar 0,13. Output ini relatif sama dengan pengaruh komite manajemen risiko terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Ketika personil yang duduk di komite pemantau risiko cenderung konservatif dalam hal pengungkapan informasi, akan berakibat pada terbatasnya jumlah informasi yang diungkapkan. Tujuannya untuk menjaga integritas perusahaan. Temuan ini menolak hipotesis 8 (H_8).

Kepemilikan Institusi dan Pengungkapan sukarela

Presentase kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela (prob. 0,45). Besar kecilnya presentase kepemilikan tidak akan menggeser EII. Hal ini sangat mungkin terjadi jika kepemilikan institusi tersebar merata dengan jumlah yang relatif di bawah 20% per kepemilikan dan masing-masing memiliki preferensi untuk membatasi akses informasi publik. Hasil analisis ini bertentangan dengan hipotesis 9 (H_9). Temuan ini berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Wijayani *et. al.*, 2019).

Dari serangkaian diskusi di atas, yang mengacu pada tabel 5, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela yang diprosikan dengan indeks identitas etika. Temuan ini memberikan implikasi terhadap penambahan khasanah keilmuan ekonomi Islam yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela di perbankan syariah. Dari temuan empiris ini dapat ditarik implikasi praktis bagi perbankan syariah



dan pihak-pihak terkait, untuk lebih memaksimalkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik memiliki efek terhadap tingkat pengungkapan sukarela, yang pada umumnya lebih disukai oleh para pengguna informasi (masyarakat).

SIMPULAN

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada 13 bank syariah di Indonesia (2016-2019). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel model *fixed effect*, secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh (positif dan negatif) terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank syariah, yang diukur dengan EII. Berikut rincian hasil investigasi empiris dengan 9 atribut tata kelola perusahaan; (1) Kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, serta komite tata kelola terintegrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perbankan syariah; (2) Komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perbankan syariah; (3) Komite tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perbankan syariah.

Keterbatasan panelitian ini dapat disempurnakan pada penelitian berikutnya. Di antara saran perbaikan yang bisa dilakukan adalah; (1) Sampel data ditentukan dengan teknik penyampelan yang memungkinkan untuk menjangring lebih banyak sampel; (2) Sampel data berasal dari seluruh tipe bank syariah, minimal perwakilan dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah; (3) Perlu memasukkan variabel kontrol untuk menguji kekuatan model (*robustness*), misalnya dengan menggunakan ukuran bank atau status kepemilikan bank syariah (BUMN - Non-BUMN); (4) Hasil pengujian empiris perlu diuji kembali dengan variabel lain, misalnya kinerja bank syariah, sehingga akan menggambarkan esensialnya pengungkapan sukarela pada bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nimer, M. (2019). The Effect of corporate governance rules on voluntary disclosure in Jordanian Corporations Listed with the Amman Stock Exchange (ASE): (An Empirical Study). *Studies in Business and Economics*, 4(1), 254–168.
- Andriyanto, R. W., & Metalia, M. (2015). Perbandingan Tingkat Kelengkapan Mandatory Disclosure dan Voluntary Disclosure Informasi Akuntansi antara Industri High-Profile dan Low-Profile. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 15–35.
- Fatmawati, R., Astuti, D. W., & Suhardjanto, D. (2018). Peran Corporate Governance Dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 57–69. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9004>
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews 10* (2 ed.). Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). “Exploring the ethical identity of Islamic banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76, 97–116.
- Hasan, Moh. A. K., Prastiwi, I. E., & Triono, D. C. (2017). Pengaruh Fee dan Religiusitas terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 113–133.
- Hitten, A. (2016). Kebijakan Dividen dari Perspektif Agency Cost Model (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 5(1), 73–93. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i1.16184>
- Li, H., & Qi, A. (2018). Impact of Corporate Governance on Voluntary Disclosure in Chinese Listed Companies. *Corporate Ownership and Control*, 5(2).
- Magdalena, S., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Firm Size dan Good Corporate Governance serta Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 221–238.



- Melyana, R., & Syafruddin, M. (2015). Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 248–258.
- PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (2018). *Penguatan Ekosistem Bisnis Syariah (Laporan Tahunan 2018)*.
- PT. Bank Syariah Mandiri. (2019). *Memberikan Nilai Tambah melalui Pengembangan Kapabilitas Internal (Laporan Tahunan 2019)*.
- Rokhaniyah, S. (2020a). Pengaruh Indikator Fundamental dan Makroekonomi terhadap Harga Saham yang Tergabung dalam ISSI. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 4(1).
- Rokhaniyah, S. (2020b). Studi Empiris: Kebijakan Dividen pada Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntabel*, 17(1), 53–61.
- Saha, R., & Kabra, K. C. (2019). Does corporate governance influence voluntary disclosure? Evidence from India. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 3(2).
- Syafitri, T., Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 56(1).
- Verbeek, M. (2012). *A guide to modern econometrics* (4 ed.). Wiley.
- Wijayani, D. R., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(4).
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.

